

LAPORAN KINERJA

Politeknik Negeri Sriwijaya

2019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2020



LAPORAN KINERJA

Politeknik Negeri Sriwijaya

Tahun 2019

Kata Pengantar

Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang berkembang berdasarkan kualitas dan kuantitas secara signifikan. Visi Polsri adalah Menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi yang Unggul dan Terkemuka dan memiliki 4 (empat) Misi mencakup pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) serta membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral. Visi dan misi Polsri dijabarkan lebih jelas dalam Rencana Strategis, uraian detail visi-misi-tujuan-sasaran strategis (VMTS) ini dituangkan di dalam Rencana Strategis Polsri (Renstra Polsri) 2015-2019.

Visi dan Misi Polsri merupakan panduan arah pengembangan Polsri masa depan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai perguruan tinggi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat dalam meningkatkan daya saing dan mengangkat martabat bangsa Indonesia. Mekanisme penyusunan Visi dan Misi Polsri merupakan proses yang melibatkan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan perubahan di tataran nasional, regional, dan global. Visi dan Misi Polsri mendasari penyusunan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (RENSTRA), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polsri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan seluruh kegiatan dalam bentuk tertulis tentang pertanggungjawaban kinerja yang memaparkan pencapaian sasaran diikuti dengan uraian keberhasilan dan kegagalan dari setiap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan didokumentasikan sesuai Dokumen Penetapan Kinerja Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2019.

Penyusunan LAKIP ini merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah yang mengikatnya. Pembahasan materi LAKIP tahun 2019 ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2015-2020 dan Penetapan Kinerja tahun 2019 yang disepakati dan ditandatangani antara Direktur Polsri dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

LAKIP Polsri tahun 2019 memuat capaian 7 (Tujuh) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan menjadi sangat penting maknanya sebagai sumber informasi yang terpercaya baik untuk pihak internal Polsri maupun eksternal.

Pada akhirnya, semoga LAKIP Polsri tahun 2019 ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Direktur,



Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T.
NIP. 196812041997031001



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Politeknik Negeri Sriwijaya
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Politeknik Negeri Sriwijaya tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Politeknik Negeri Sriwijaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 14 Maret 2020
Ketua SPI,


Purwati, S.E., M.M
NIP. 196507111988032002

CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan	Check list	Penjelasan	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓	

No.	Pernyataan	Check list	Penjelasan
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
	4. Target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
	5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√	
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	-	
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran. Jika tidak telah terdapat penjelasan yang memadai	√	
	9. IKU dan IK telah SMART	√	

Palembang, 14 Maret 2020

Ketua SPI



Purwati, S.E., M.M.

Pur NIP 196507111988032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	v
DAFTAR ISI.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Tupoksi dan Struktur Organisasi Polsri	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Tujuan Strategis	11
2.3 Program Utama	12
2.4 Target Kinerja Polsri Tahun 2019	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	19
3.2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	20
3.3 Capaian Kinerja Polsri.....	22
3.4 Analisis Capaian Kinerja.....	22
3.5 Realisasi Anggaran	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasuasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, serta Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Seluruh civitas akademika yang ada di Polsri bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi Polsri dengan cara melaksanakan semua program kegiatan yang telah direncanakan tiap tahun, tuntutan kebutuhan masyarakat baik masyarakat industri maupun masyarakat lainnya, adalah tantangan lembaga Polsri agar mampu merespon dengan cepat dan efektif efisien dalam memenuhi perubahan secara cepat.

Tantangan yang ada merupakan peluang bagi Polsri untuk terus mengatasi kondisi yang sesuai di mulai dengan menata proses belajar dengan baik dengan menggunakan sarana prasara yang maksimal seperti menggunakan multimedia digital, hal ini sangat mendukung dengan kondisi pandemic ini sehingga membuat proses belajar mengajar lebih variatif.

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi, POLSRI menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Masing – masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Evaluasi kinerja dari beberapa program telah dilaksanakan selama januari hingga Desember tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Politeknik Negeri Sriwijaya, dahulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya secara resmi dibuka pada tanggal 20 September 1982. Pada fase pertama Politeknik hanya mempunyai 2 (dua) Jurusan yaitu Jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Teknik Mesin dan dengan sarana pendidikan, staf pengajar dan kurikulum yang dirakit secara nasional dan terpusat di Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik PEDC Bandung. Pada fase kedua tahun 1987 Politeknik memperluas bidang keteknikan dan melahirkan bidang Tata Niaga. Bidang keteknikan yang dikembangkan adalah Jurusan Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi dan Teknik Kimia Industri sedangkan bidang Tata Niaga terdiri atas Jurusan/Program Studi Akuntansi Kesekretariatan telah dimulai tahun akademik 1986. Kemudian tahun 1992 Jurusan Tata Niaga berkembang menjadi dua jurusan yaitu Jurusan Akuntansi dan Administrasi Niaga. Tenaga ahli yang turut serta mengembangkan bidang keteknikan adalah dari Swiss Contact sedangkan Tata Niaga dari Australia. Pada tahun 2002/2003 dikembangkan dua jurusan baru yaitu Teknik Komputer dan Manajemen Informatika, yang pendiriannya ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) nomor 2800/D/T/2001. Pada tahun akademik 2004/2005, Politeknik Negeri Sriwijaya kembali mengembangkan jurusan baru yaitu Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Bahasa Inggris Bisnis Pariwisata dan Perhotelan berdasarkan izin dari Dirjen Dikti nomor 3818/D/T/2003.

Program Sarjana Terapan Perancangan Jalan dan Jembatan mulai dibuka sejak tahun 2002 dan pada tahun 2009 Program Sarjana Terapan baru pada Jurusan Teknik Kimia dengan nama Program Studi Teknik Energi juga turut dibuka. Kemudian pada tahun 2012, Program Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik menyusul dibuka. Selanjutnya Program Sarjana Terapan Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi dan Usaha Perjalanan Wisata pada tahun 2013. Pada tahun 2014 ini, Program Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Teknologi Kimia Industri, Manajemen Bisnis serta Manajemen Informatika menjadi program-program studi terbaru yang dibuka oleh Politeknik. Saat ini Politeknik

Negeri Sriwijaya telah memiliki 11 Program Studi Diploma III, 11 Program Studi Diploma IV, dan 1 Program Magister (S2) Terapan.

Program Magister Terapan Polsri dengan Program Studi Teknik Energi Terbarukan yang telah dibuka sejak tahun ajaran 2016-2017 dan telah menghasilkan lulusan yang ke dua dengan 12 wisudawan.

Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai

Visi

Polsri merumuskan Visi dan Misi dalam Renstra tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:
“Menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi yang Unggul dan Terkemuka.”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Polsri menjabarkannya kedalam beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dalam bidang rekayasa dan non rekayasa yang berkualitas dengan berbasis pada sistem penjaminan mutu;
2. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan organisasi dan meningkatkan mutu pengelolaan sumber daya Polsri untuk mewujudkan kinerja secara efektif, efisiensi, dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

Tujuan Polsri adalah merupakan penjabaran yang spesifik dari visi dan misi, yaitu meliputi:

1. Meningkatnya lulusan yang berkualitas, berdisiplin, bermoral, berjiwa wirausaha, berwawasan lingkungan, dan relevan dengan perkembangan industri.
2. Meningkatnya penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya mutu manajemen melalui pemberdayaan dan pengembangan organisasi

berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan mampu menghadapi tantangan masa depan; (PP No. 66 Tahun 2010).

4. Meningkatnya mutu dan efisiensi pelayanan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan.
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
6. Meningkatnya kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sasaran

1. Bidang Pendidikan
 - Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
 - Memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan bagi yang mempunyai potensi.
 - Memperbanyak pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi keahlian.
 - Menyelenggarakan program pendidikan yang produktif dan aplikatif sesuai kebutuhan pasar kerja.
2. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM).
 - Menyelenggarakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang produktif dan inovatif dan berdampak pada kesejahteraan
3. Bidang Sumberdaya Manusia
 - Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas dalam mendukung tridarma perguruan tinggi.
4. Bidang Organisasi dan Manajemen
 - Terwujudnya good governance dalam tridarma perguruan tinggi dan pendukungnya
5. Bidang Sarana dan Prasarana
 - Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung program tridarma perguruan tinggi dan pendukungnya
6. Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerjasama
 - Memperluas peningkatan kerja sama dengan eksternal
7. Pendanaan
 - Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan
 - Memperbesar kemampuan pendanaan dengan cara diversifikasi sumber pendanaan

Pelaporan akuntabilitas kinerja Polsri bertujuan untuk melakukan evaluasi Capaian Indikator

Kinerja didasarkan atas 7 (tujuh) Sasaran Strategis Tahun 2019 dibandingkan dengan Rencana Strategis 2016-2020 dalam mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sehingga dapat beroperasi secara efisien dan responsif terhadap aspirasi *stakeholder* sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi Politeknik Negeri Sriwijaya. Laporan akuntabilitas kinerja juga lebih menekankan pada dampak internal dan tidak hanya bersifat administrasi serta memiliki peran yang besar terhadap pencapaian visi dan misi tetapi juga memiliki korelasi dengan strategi, maka laporan ini dibangun berdasarkan visi dan misi serta sasaran strategis yang telah tertuang dalam PK tahun 2019.

Lakip tahun 2019 ini menggabarkan capaian maupun hambatan dalam pelaksanaan kegiatan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaannya. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang nyata dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga dapat memberikan gambaran akuntabilitas kinerja Polsri.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polsri tahun 2018 berdasarkan 14 (empat belas) landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007

- tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Negeri Sriwijaya; dan Keputusan Menpan Nomor 164/M.PAN/6/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/O/2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya.
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 13. *Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;*
 14. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Struktur Organisasi Polsri

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tugas Polsri sebagai berikut:

Polsri mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi (Pasal 2).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Polsri menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;

- b. Pelaksanaan penelitian;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi (Pasal 3).

Polsri sebagai institusi pendidikan memiliki fungsi sebagai penyelenggara berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi bahkan dapat sebagai penyelenggara pendidikan profesi hingga program Pascasarjana.

Struktur organisasi Polsri saat ini dijalankan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 164/M.PAN/6/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/O/2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polsri. Berdasarkan keputusan tersebut Polsri sebagai perguruan tinggi negeri berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan secara fungsional berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang struktur organisasinya terdiri atas:

- a. Senat
 - Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
- b. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - a) Direktur
 - Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan. Direktur menyelenggarakan fungsi :
 - 1) pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - 2) pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- 3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- 5) pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

c. Wakil Direktur

- 1) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- 2) Wakil Direktur terdiri atas :

Wakil Direktur Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

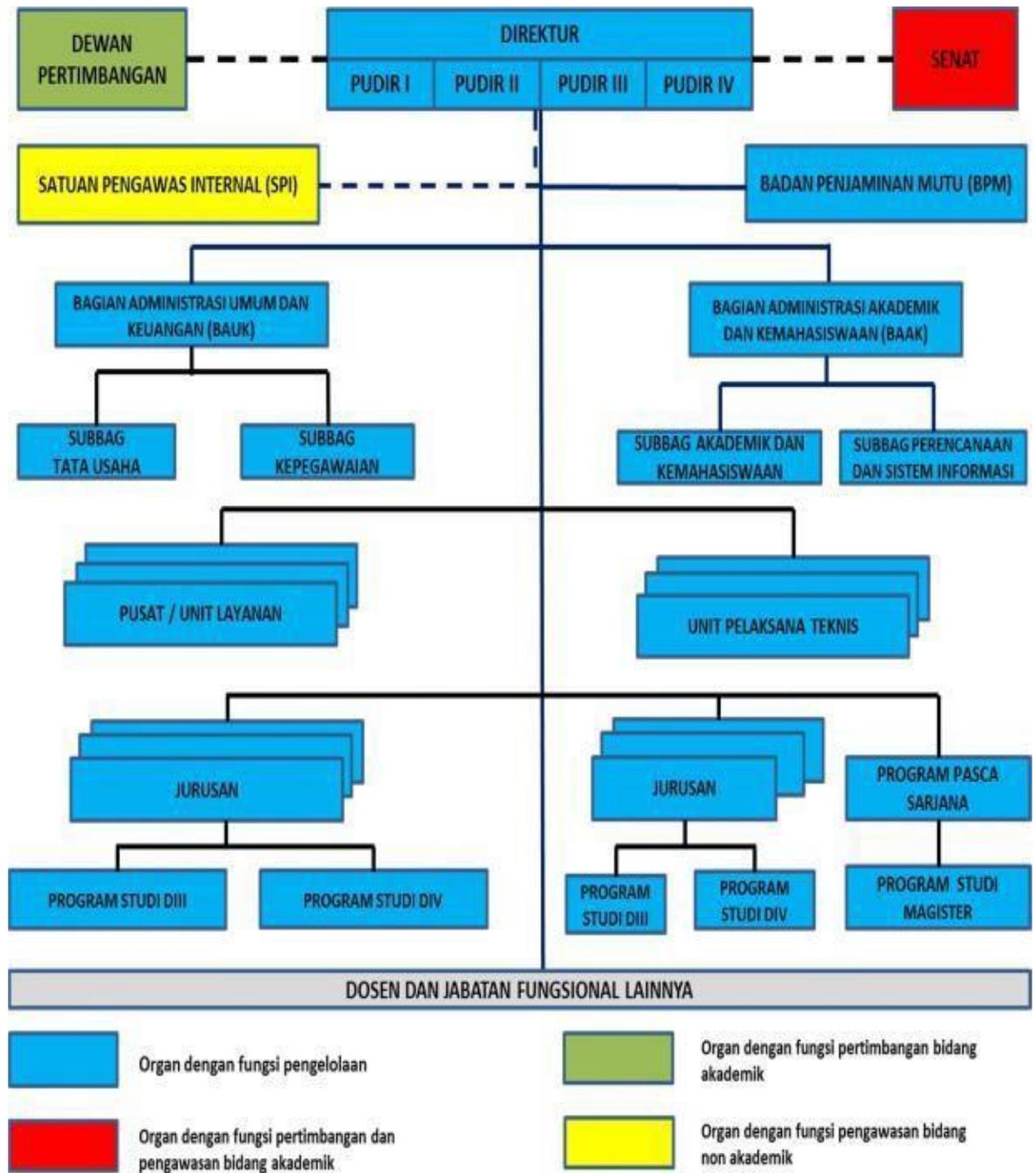
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan kerja sama.

- d. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- e. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- f. Jurusan;
 - 1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
 - 2) Jurusan terdiri atas:
 - a) Ketua Jurusan;
 - b) Sekretaris Jurusan;

- c) Program Studi; merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi.
- d) Laboratorium/Bengkel/Studio; merupakan perangkat penunjang jurusan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya memenuhi persyaratan, dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan program studi yang bersangkutan dan sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.
- e) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen, merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua Jurusan.
- g. Laboratorium/Studio;
- h. Kelompok Dosen;
- i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- j. Unit Pelaksana Teknis meliputi:
 - 1. Perpustakaan;
 - 2. Bengkel/Laboratorium;
 - 3. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - 4. Unit Pelayanan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
 - 5. Unit Pelaksana Teknis lainnya.
- k. Dewan Penyantun.

Struktur Organisasi Polsri terlihat pada Gambar 1.1 mengacu pada peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 54 tahun 2011 tentang statuta Polsri pada Bab IV Organ Polsri. Struktur Organisasi Polsri terlihat pada Gambar 1.1 mengacu pada peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 54 tahun 2011 tentang statuta Polsri pada Bab IV Organ Polsri.



Gambar 1 Struktur Organisasi Polstri

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan Strategis

Sesuai dengan visi dan misi yang telah digali atas hasil analisa terhadap tantangan dan kenyataan maka Polstri berkehendak untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya lulusan yang berkualitas, berdisiplin, bermoral, berjiwa wirausaha, berwawasan lingkungan, dan relevan dengan perkembangan industri.
2. Meningkatnya jumlah APK calon pendaftar dan mahasiswa baru.
3. Meningkatnya jumlah lulusan yang dapat diterima langsung oleh dunia usaha dan dunia industri.
4. Meningkatnya penyebarluasan IPTEK dan seni serta hasil penelitian terapan yang bermutu dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Meningkatnya mutu manajemen melalui pemberdayaan dan pengembangan organisasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan mampu menghadapi tantangan masa depan; (PP No. 66 Tahun 2010 Pasal ayat 2) dan meningkatnya mutu dan efisiensi pelayanan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik.
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan laboratorium layanan bagi mitra.
7. Meningkatnya kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kelima tujuan tersebut merupakan kesatuan konsep dengan visi dan misi, sehingga setiap butir tujuan merupakan petunjuk arah pencapaian sasaran dengan indikator kinerja yang terukur dan setiap indikator kinerja merupakan indikasi kuantitatif pencapaian.

2.2 Sasaran Strategis

Polsri sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai penjabaran dari Tridarma perguruan tinggi dan pendukung Tridarma Perguruan Tinggi yang diterapkan pada masing-masing bidang, yaitu :

a) Sektor Tridarma Perguruan Tinggi

1. Bidang Pendidikan

- Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- Memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan bagi yang mempunyai potensi.
- Memperbanyak pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi keahlian.
- Menyelenggarakan program pendidikan yang produktif dan aplikatif sesuai kebutuhan pasar kerja.
- Membuka program D III baru dan D IV serta kelas kerja sama.

2. Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM)

- Menjadi bagian penting dalam PPM terutama untuk mengatasi masalah lokal maupun nasional.
- Menghasilkan PPM yang berdampak pada kesejahteraan.
- Menyelenggarakan program PPM yang produktif.
- Memberdayakan potensi daerah serta ikut berkontribusi pada pemecahan masalah dalam masyarakat

b) Sektor Pendukung Tridharma Perguruan Tinggi

1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

- Tersedianya SDM handal yang memiliki kompetensi untuk mendukung pendidikan dan PPM.
- Tersedianya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan iklim kondusif yang mendukung tridharma perguruan tinggi dengan baik.

- Tersedianya dosen yang mempunyai sertifikat keahlian dan/atau sertifikasi dosen.
2. Bidang Organisasi dan Manajemen
 - Terwujudnya *good governance* dalam bidang tridharma perguruan tinggi.
 - Tersedianya sistem pengalokasian dana untuk efektivitas penggunaan dana.
 3. Bidang Sarana dan Prasarana
 - Tersedianya sarana dan prasarana tridharma perguruan tinggi.
 - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tridharma perguruan tinggi.
 4. Bidang Sumber Dana
 - Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berkembang.
 - Memperbesar kemampuan pendanaan dengan cara diversifikasi sumber pendanaan dari Tridharma perguruan.

Adapun 7 (tujuh) Sasaran Strategis Polsri yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi
2. Memperluas Kesempatan Mendapatkan Pendidikan yang layak
3. Terselenggaranya Pendidikan dan Pengajaran yang Relevan Dengan Iptek dan Pasar Kerja
4. Menyelenggarakan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Produktif dan Inovatif dan Berdampak pada Kesejahteraan
5. Tersedianya SDM yang Handal dan Berkualitas Dalam Mendukung Tridharma Perguruan Tinggi
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Pendukungnya
7. Memperluas Peningkatan Kerjasama dengan External

2.3 Program Utama

Program utama merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, yang indikator kinerja utama berupa

dampak (*outcome*) yang ditimbulkan dalam mendukung visi dan misi. Capaian indikator kinerja utama capaian yang diperoleh selama tahun 2018 dandapat diuraikan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*).

Penetapan program utama diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program utama sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Polsri. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi dan misi organisasi dengan batasan waktu satu tahun. Tabel 1 merangkum Keterkaitan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Program Utama dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 1. Keterkaitan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Program Utama dan Indikator Kinerja Utama

Misi	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdisiplin, bermoral dan kompetitif serta memiliki jiwa kewirausahaan dan wawasan lingkungan	Meningkatnya lulusan yang berkualitas, berdisiplin, bermoral, berjiwa wirausaha,berwawasan lingkungan, dan relevan dengan perkembangan industri.	1. Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi	1. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi Profesi 2. Persentase Prodi Terakreditasi minimal B 3. Jumlah Mahasiswa Berprestasi 4. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha
	Meningkatnya jumlah APK calon pendaftar dan mahasiswa baru	2. Memperluas Kesempatan Mendapatkan Pendidikan yang layak	5. Rasio Jumlah Calon Mahasiswa Terhadap Daya Tampung
	Meningkatnya jumlah lulusan yang dapat diterima langsung oleh dunia usaha dan dunia industri	3. Terselenggaranya Pendidikan dan Pengajaran yang Relevan Dengan Iptek dan Pasar Kerja	6. Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja sesuai Bidanganya

<p>2. Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta hasil penelitian terapan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat</p>	<p>Meningkatnya penyebaran IPTEK dan seni serta hasil penelitian terapan yang bermutu</p>	<p>4. Menyelenggarakan Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Produktif dan Inovatif dan Berdampak pada Kesejahteraan</p>	<p>7. Ranking PT Nasional/Ranking Politeknik 8. Ranking PT Tingkat Politeknik 9. Akreditasi Institusi 10. Jumlah Publikasi Internasional 11. Jumlah HKI yang didaftarkan 12. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 13. Jumlah Protitipe Industri 14. Jumlah Protitipe R&D</p>
<p>3. Mengembangkan lembaga pendidikan tinggi yang berorientasi pada kualitas, profesionalisme dan keterbukaan serta mampu menghadapi persaingan global</p>	<p>meningkatnya mutu dan efisiensi pelayanan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik.</p>	<p>5. Tersedianya SDM yang Handal dan Berkualitas Dalam Mendukung Tridarma Perguruan Tinggi</p>	<p>15. Persentase dosen berkualifikasi S3 16. Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik</p>
	<p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan laboratorium layanan bagi mitra</p>	<p>6. Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Program Tridarma Perguruan Tinggi dan Pendukungnya</p>	<p>17. Jumlah laboratorium Tertsertifikasi</p>
	<p>Meningkatnya kemitraan dengan pihak lain yang saling menguntungkan</p>	<p>7. Memperluas Peningkatan Kerjasama dengan External</p>	<p>18. Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti</p>

2.4 TARGET KINERJA POLSRI TAHUN 2019

Pada tahun 2019 Polsri juga telah menetapkan rencana capaian target kinerja yang dirangkum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 antara Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya dengan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi tertampil gambar 1.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah mahasiswa berwirausaha	20
	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	100
	Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B	82
	Jumlah mahasiswa berprestasi	30
	Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja	30
Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti	Ranking PT Politeknik Nasional	2
	Akreditasi Institusi	A
Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti	Persentase Dosen Berkualifikasi S3	11
	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	45
	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	0
	Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri	5
	Jumlah kerja sama dengan industri	10
Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	0
	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	0
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	Jumlah Publikasi Nasional	70
	Jumlah Publikasi Internasional	40
	Jumlah Kekayaan Intelektual yang Didaftarkan	19
	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R & D)	30
	Jumlah Prototipe Industri	2
	Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional	25
	Jumlah Sitasi Karya Ilmiah	350
	Jumlah Produk Inovasi	8

Kegiatan	Anggaran
[2642] Penyediaan Dana Bantuan Operasional Untuk Perguruan Tinggi Negeri Dan Bantuan Pendanaan Ptn-bh	Rp. 7.900.000.000
[5741] Dukungan Manajemen Ptn/kopertis	Rp. 78.548.674.000
[5742] Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	Rp. 32.400.819.000
[5697] Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	Rp. 5.469.000.000
Total	Rp. 124.318.493.000

Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi



Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak

Jakarta, 13 Mei 2019
Direktur Politeknik Negeri
Sriwijaya



Dr. Ing. Ahmad Taqwa, MT

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja antara atasan (Menristekdikti) dan bawahan (Direktur Polsri) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja (PK) disusun berdasarkan Renstra Polsri dan database target serta capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya (tabel PK terlampir).

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang mendukung akuntabilitas kinerja Polsri ditunjukkan dari hasil pengukuran kinerja atas capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran belanja pada bidang, jurusan, bagian, pusat, dan unit kerja di lingkungan Polsri, baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2019.

Proses pengukuran kinerja dan penerapan SAKIP, Capaian Kinerja Organisasi / Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur dengan Menristekdikti, dan analisis capaian kinerja tiap Sasaran akan diuraikan seperti berikut ini:

3.1. Pengukuran Kinerja Polsri

Pengukuran kinerja Polsri merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Polsri. Pengukuran kinerja ini akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial pimpinan Polsri sampai ke bidang, jurusan, bagian, pusat dan unit yang dicapai, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas Polsri. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya pada tahun 2019, sehingga dapat dilihat jumlah persentase pencapaiannya pada indikator – indikator utama.

Berdasarkan capaian kinerja ini dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilannya, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Dalam pemenuhan pengukuran kinerja di Polsri, terdapat indikator kinerja *outcome/output* sebagai ukuran secara formal. Analisis capaian Indikator kinerja tersebut disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan cara penetapan masing-masing IK dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren kinerja selama tahun 2015 sampai dengan 2019 dan pencapaiannya disajikan berupa tabel, foto, grafik, dan data dukung lainnya.

Untuk mendukung pengukuran capaian kinerja di Polsri terdapat mekanisme penyusunan LKJ, dimana penyusunannya melalui pengumpulan data kinerja,

yang pengumpulan datanya dilakukan secara triwulanan/semesteran melalui rapat kerja dalam rangka evaluasi pencapaian kinerja Polsri. Rapat kerja diikuti oleh semua unsur pimpinan jurusan, bagian, pusat dan unit pelaksana teknis. Dalam rapat kerja tersebut wajib dilaporkan hasil kinerja masing-masing, sehingga dapat diketahui ketercapaian indikator *outcome/output*.

3.2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Polsri secara terus menerus melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Komponen dari SAKIP meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

a. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, Polsri telah menetapkan Renstra Polsri 2015 – 2019, dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya. Dokumen Renstra Polsri tercantum Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program beserta target – target yang hendak dicapai.

b. Pengukuran Kinerja

Polsri berusaha melakukan pengukuran atas target-target yang direncanakan dengan menetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama yang berorientasi hasil (*outcome*).

c. Pelaporan Kinerja

Penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja (LKJ) secara terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan antara lain melalui Capaian Kinerja dari jurusan, bagian, pusat, dan unit pelaksana teknis dengan Indikator Kinerja Utama yang terukur. Laporan Kinerja (LKJ) ini juga terus ditingkatkan kualitasnya diantaranya dengan menggambarkan perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, tren kinerja dan pada akhir periode Renstra maupun kontribusinya terhadap pencapaian nasional.

Laporan Kinerja (LKJ) Polsri disusun oleh Tim Penyusun yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang relevan yang bersinergi dengan Bagian Perencanaan Bagian Akademik,

Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, di bawah tanggung jawab Wakil Direktur Bidang I.

Informasi yang disampaikan dalam LKJ Polsri telah didukung dengan data yang memadai, dengan mekanisme penyampaian data dan informasi LKJ mulai dari unit kerja, ke unit penyusun dan dilakukan setiap triwulan/semesteran dan dilaporkan oleh penanggungjawab unit – unit terkait yaitu Ketua Jurusan, Kepala Bagian, Kepala Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Direktur, yang telah diyakini kebenarannya.

Data dan informasi yang sudah dikumpulkan oleh jurusan, bagian, pusat, dan unit pelaksana teknik akan diolah oleh penyusun menjadi Laporan Kinerja (LKJ) Polsri tahun 2019.

Hasil analisis LKJ telah diketahui oleh unit kerja terkait, melalui laporan capaian kinerja Polsri kepada jurusan, bagian, pusat, dan unit pelaksana teknis yang dilaksanakan pada awal bulan Januari tahun 2019.

d. Evaluasi Kinerja

Polsri sudah melakukan evaluasi kinerja dengan melaksanakan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, dan evaluasi program serta anggaran. Hasil dari evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Polsri akan mengembangkan pelaksanaan evaluasi kinerja dengan membuat sistem laporan kinerja untuk jurusan, pusat, bagian dan unit pelaksana teknis.

Dalam mengembangkan evaluasi program didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan dimonitoring dengan baik melalui pembahasan – pembahasan secara reguler dan bertahap baik formal maupun informal (triwulan, semesteran dan tahunan). Tujuan dilaksanakan evaluasi program untuk menilai keberhasilan program, dapat memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dilaksanakan.

e. **Capaian Kinerja**

Dalam rangka pencapaian kualitas penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja Polsri, telah dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan membandingkan antara target dan capaian dengan tahun sebelumnya.

3.3. Capaian Kinerja Polsri

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Polsri dengan Menristekdikti tahun 2019. Capaian indikator tersebut merupakan tolak ukur capaian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi tanggung jawab Polsri yang ditetapkan (Renstra Polsri 2015 – 2019) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019 serta Rencana Strategis Polsri 2015-2019.

3.4. Analisis Capaian Kinerja

Polsri telah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam periode 2019 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan dikti
3. Meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti
4. Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi
5. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

Capaian kinerja Sasaran Strategis Polsri tahun 2019 tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama Polsri tahun 2019 secara umum berhasil dipenuhi, bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan.

Adapun Capaian indikator kinerja utama dapat dijelaskan Berdasarkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi

Dalam rangka mewujudkan alumni yang siap kerja dan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja sebagai pengguna alumni selain membekali alumni dengan sertifikasi kompetensi dan profesi, Politeknik Negeri Sriwijaya juga melakukan beberapa upaya mulai dari

mempersiapkan program studi (prodi) dan seluruh perangkatnya untuk dapat meraih akreditasi minimal B, melakukan pembekalan terhadap alumni melalui pembinaan mahasiswa yang memiliki prestasi sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Mahasiswa juga dibekali kemampuan berwirausaha, dengan harapan alumni Politeknik Negeri Sriwijaya mampu membuka lapangan kerja baru tidak hanya bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi lingkungannya.

Berikut disajikan data indikator kinerja dari beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Sasaran strategis meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi pada tahun anggaran 2019, seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Target dan realisasi indikator kinerja Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Jumlah mahasiswa berwirausaha	20	40
2	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	100	64
3	Persentase prodi terakreditasi minimal B	82	74
4	Jumlah mahasiswa berprestasi	30	56
5	Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja	30	20

Analisis:

Jumlah mahasiswa yang melakukan wirausaha pada tahun 2019 adalah sebanyak 40 orang mahasiswa. Jenis usaha yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki kesesuaian dengan program studi yang sedang dijalani oleh mahasiswa tersebut. Pada tahun 2019, Polsri mengalokasikan dana untuk kegiatan wirausaha mahasiswa yang diseleksi melalui proses kompetisi. Ada 10 kelompok usaha yang didanai dan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang mahasiswa. Mekanisme seleksi dan pelaksanaan wirausaha dibimbing oleh dosen masing-masing prodi. Pada akhir tahun anggaran, tiap kelompok usaha ini memberikan laporan kondisi usaha disertai analisis kegagalan dan juga analisis percepatan pertumbuhan berupa inovasi.

Sertifikat Kompetensi Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan salah target layanan Polsri untuk mahasiswa dalam rangka persiapan memasuki dunia kerja. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan SKPI ini, Polsri sudah memiliki LSP sendiri. Pada tahun 2019, jumlah lulusan tahun 2019 yang memiliki sertifikat kompetensi hanya sebanyak 961 mahasiswa atau sebesar 64 %. SKPI ini didominasi oleh Jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Akuntansi dan Administrasi Bisnis.

Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 hanya jurusan ini yang telah siap skema uji dan memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) sehingga dapat melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi. Langkah yang dilakukan adalah memberikan pelatihan assessor kompetensi bagi dosen Polsri dan menyediakan sarana dan prasarana uji kompetensi yang sesuai dengan skema uji yang disusun. Harapannya adalah lulusan Polsri pada tahun 2020 semuanya telah memiliki SKPI.

Pada tahun 2019 Polsri memiliki 56 orang orang mahasiswa yang memiliki prestasi pada tingkat nasional dan internasional. Jenis prestasi yang diperoleh dalam bidang Iptek, seni, budaya dan olahraga.

Polsri memiliki 23 prodi dalam memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa. Tabel 3.2 menampilkan predikat akreditasi program studi yang ada di polsri.

Table 3.2 Predikat akreditasi Program studi Polsri tahun 2019

PREDIKAT AKREDITASI	JUMLAH PRODI	KETERANGAN
A	2	D 3 Akuntansi & D 3 Adm. Bisnis
B	15	
C	6	

Dari target 82 % prodi yang ada di Polsri memiliki predikat minimal “B” hanya tercapai sebesar 74%. Hal ini terjadi karena prodi yang memiliki predikat akreditasi dengan nilai “C” adalah untuk prodi yang baru terbentuk dan belum melakukan proses reakreditasi. Persiapan proses reakreditasi telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan diharapkan pada tahun 2020 semua prodi yang memiliki predikat akreditasi “C” dapat melakukan proses reakreditasi dan mendapatkan predikat nilai minimal “B” sehingga pada tahun 2020 semua prodi yang ada di Polsri 100% sudah terakreditasi minimal “B”.

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan dikti

Penetapan Sasaran strategis meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan dikti dimaksudkan sebagai tolok ukur layanan pendidikan yang berkualitas. Pengakuan terhadap kualitas kinerja institusi diukur dengan indicator kinerja seperti pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Target dan realisasi indikator kinerja Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan dikti

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Ranking PT Politeknik Negeri	2	12
2	Akreditasi institusi	A	B

Analisis:

Pada tahun 2019, Kemenristekdikti mengeluarkan hasil klasterisasi perguruan tinggi dalam dua (2) kategori yaitu kategori Perguruan Tinggi Non-Vokasi (pendidikan akademik), yang terdiri dari Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi, dan kategori Perguruan Tinggi Vokasi, yang terdiri dari Politeknik dan Akademi. Dalam klasterisasi ini, Polsri berada posisi 12 untuk kategori perguruan tinggi vokasi. Pada tahun 2018, Polsri berada pada posisi 2 sehingga untuk tahun 2019 maka target yang ditetapkan adalah mempertahankan posisi tersebut.

Penurunan posisi ini bukan berarti tingkat layanan pendidikan yang dilakukan Polsri menjadi menurun hal ini terjadi lebih disebabkan karena Perguruan tinggi lain yang melakukan percepatan yang sangat luar biasa sehingga mampu melampaui Polsri pada tahun 2019. Selain itu, spesifikasi penilaian apa saja yang diambil untuk klasterisasi yang belum diketahui secara detil Polsri juga memberikan peran dalam hal tidak tercapainya target ranking pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 Polsri mengajukan diri untuk proses reakreditasi institusi dengan harapan dapat berubah menjadi "A". Setelah dilakukan proses assesmen oleh BAN-PT terhadap terhadap reakreditasi institusi Polsri ternyata hasil yang didapat predikat akreditasi Polsri masih tetap berada pada posisi "B". Faktor penilaian untuk akreditasi institusi yang memiliki nilai tidak maksimal diantaranya adalah pada bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tahun penilaian reakreditasi dimulai pada tahun 2016 – 2018, pada periode tersebut jumlah publikasi ilmiah Polsri masih rendah disbanding jumlah dosen yang ada. Fokus pembenahan yang akan dilakukan antara lain mendorong dosen untuk aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan cara melakukan workshop penulisan karya ilmiah dan meningkatkan jumlah pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui dana PNBK. Sejak tahun 2018, Polsri memberikan mandate penelitian penugasan kepada 25 % dosen setiap tahunnya dan dana tersebut

mencukupi untuk menghasilkan suatu publikasi ilmiah di jurnal internasional. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penilaian akreditasi agar untuk proses reakreditasi lagi pada masa yang akan datang Polsri mampu memperoleh predikat akreditasi "A".

Pembenahan dan pengembangan system tata kelola untuk menjadi lebih baik sangat dibutuhkan demi terwujudnya layanan prima pendidikan. Dengan terciptanya atmosfer perkantoran dan pendidikan yang baik diyakini mampu menaikkan ranking perguruan tinggi Polsri dan juga mampu meningkatkan predikat akreditasi Polsri.

Sasaran strategis meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti

Kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti tercermin dari sumberdaya manusia yang dimiliki dan dukungan industry dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran strategis *meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti terlihat pada table 3.4 berikut ;*

Table 3.4 Target dan realisasi *meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Persentase dosen berkualifikasi S3	11	40
2	Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala	45	165
3	Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar	0	0
4	Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri	5	4
5	Jumlah kerja sama dengan industri	10	15

Analisis:

Pada tahun 2019 jumlah dosen tetap polsri adalah sebanyak 377 orang. Sebanyak 40 orang dosen telah memiliki kualifikasi S3 dan 14 orang sedang studi lanjut S3. Dari sisi jabatan akademik pada tahun 2019 Polsri belum memiliki guru besar, sedangkan jumlah dosen yang telah menduduki jabatan Lektor Kepala sejumlah 165 orang dosen. Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran Polsri juga memiliki 15 orang dosen atau setara 4 % dosen yang berasal dari industry dan secara rutin memberikan perkuliahan bagi mahasiswa Polsri.

Polsri juga membina kerjasama dengan dunia industri dalam bidang pendidikan. Kerjasama ini dimaksudkan agar pihak industri bersedia untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa polsri dalam hal penelitian yang terkait penyelesaian laporan akhir, praktek dan magang industri. Selain kerjasama pendidikan pihak industri juga melakukan kerjasama pengembangan iptek agar dosen polsri mampu mensejajarkan diri dengan perkembangan teknologi.

Dari penetapan target kinerja untuk Sasaran strategis meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti dapat direalisasikan dengan baik.

Sasaran strategis terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan Sasaran strategis terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi tertampil pada table 3.5 berikut;

Table 3.5 Target dan realisasi terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	0	0
2	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	0	0

Analisis:

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik serta berkualitas adalah tercermin dari tidak ditemukannya temuan kesalahan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini target temuan kesalahan dari BPK adalah tidak ada atau 0 (NOL). Pada tahun 2019, polsri tidak memiliki hasil temuan kesalahan dari audit BPK.

Sasaran strategis meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan

Dalam rangka mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya telah menetapkan sasaran strategis *meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan* pada masyarakat yang produktif dan diupayakan berkontribusi pada pemecahan masalah

pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Indikator kinerja yang digunakan pada sasaran strategis ini untuk tahun 2019 seperti pada Tabel 3.6 berikut ;

Table 3.6 Target dan realisasi *meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Jumlah publikasi Nasional	70	90
2	Jumlah publikasi Internasional	40	92
3	Jumlah prototipe penelitian dan pengembangan (research and Development / R&D)	19	18
4	Jumlah prototipe industri	30	28
5	Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional	2	4
6	Jumlah sitasi karya ilmiah	25	13
7	Jumlah produk inovasi	350	1.477
8	Jumlah produk inovasi	8	5

Analisis:

. Sebagai upaya memetakan mutu dan potensi perguruan tinggi di Indonesia, maka Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) telah melakukan pengelompokan (klasterisasi) perguruan tinggi. Performa perguruan tinggi tersebut dinilai dari 4 komponen utama, mulai dari kualitas SDM, kualitas kelembagaan, kualitas kegiatan kemahasiswaan, hingga kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. Pemeringkatan ini terbagi dalam kelompok non politeknik dan politeknik.

Dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian, Polsri memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun 2016-2020 (*SK Direktur No.8003/PL6.4.2/ SK/2016*) dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra Pengabdian) tahun 2016-2020 (*SK Direktur Polsri No. 7639/PL6.4.2/SK/2016*).

Indikator yang sangat berpengaruh pada kinerja dalam bidang penelitian dan pengabdian antara lain adalah luaran hasil penelitian dan pengabdian dalam bentuk: 1) jumlah publikasi internasional, 2) jumlah HKI yang didaftarkan, 3) jumlah sitasi karya ilmiah, 4) jumlah prototipe industri, dan 5) jumlah prototipe R&D.

Publikasi pada jurnal internasional yang dicapai 92 jurnal pada tahun 2019, dibandingkan target 40 jurnal maka capaian kinerja adalah 230 %. Kesulitan mencapai target dibidang luaran ini dikarenakan sistem pengumpulan data masih manual. Upaya yang dilakukan adalah mencari data dari *google scholar*, Portal Garuda, Indonesian Publication Index (IPI), pengindex SINTA (Science and Technology Index), pengindex Scopus, pengindex DOAJ (Direct Open Acces Journal).

Sementara itu jumlah HKI yang didaftarkan pada tahun 2019 sebesar 95%. Target yang ditentukan sebanyak 19 HKI, realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah 18 HKI. Upaya yang dilakukan Polsri dalam mendorong dosen untuk mengusulkan HKI adalah mengirim beberapa dosen pelatihan pengusulan HKI.

Jumlah sitasi karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal/prosiding internasional (terindeks scopus) pada tahun 2019 mencapai 1.477 sitasi. Dibandingkan jumlah sitasi karya ilmiah yang targetkan 350, maka capaian kinerja sebesar 422%.

Program penelitian yang menghasilkan prototipe industri pada tahun 2019 mencapai 4 buah prototype (200%) disbanding rencana yang hanya 2 buah prototipe. Semua prototype industry tersebut telah didaftarkan di kementerian hukum dan ham dan sudah memiliki Haki.

Jumlah prototipe R&D pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 28 prototipe. Capaian kinerja adalah 93% dari target 30 prototipe R&D. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja ini, berupa penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Polsri tahun 2016-2020 dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra Pengabdian) Polsri tahun 2016-2020. Hal ini diupayakan agar terjadi sinergi dan kesinambungan antar program penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh para dosen Polsri.

Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja untuk sasaran *meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan* berjalan dengan baik.

3.5 Realisasi Anggaran

Secara umum kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian keuangan meliputi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran secara terpadu dari sumber APBN/DIPA dan sumber lain.
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran
- c. Penyusunan revisi/perubahan anggaran PNBK

Komposisi belanja Polsri untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut

- Belanja Pegawai	: Rp. 60.713.934.000,-
- Belanja Barang	: Rp. 74.515.239.000,-
- Belanja Modal	: <u>Rp. 30.018.525.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 165.247.698.000,-

Selanjut serapan anggaran Polsri untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 149.327.807.676,- atau setara dengan 90,37%.